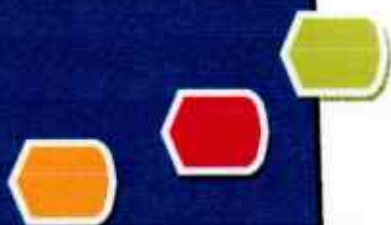




Laporan Kinerja (LKj)

Tahun 2019



**DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 telah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan ketahanan pangan pada tahun 2019 dan merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016-2021.

Program/kegiatan-kegiatan ketahanan pangan yang dilaksanakan selama tahun 2019 adalah upaya peningkatan pendapatan dan terciptanya ketahanan pangan secara umum mencapai sasaran, namun demikian berbagai kendala masih menghambat pelaksanaan beberapa program/kegiatan sesuai sasaran yang diinginkan, hal ini kedepan tentu membutuhkan pemikiran lebih lanjut dalam pemecahan, serta melakukan perbaikan dan penajaman renstra, program dan kegiatan pada periode berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, Maret 2020
Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, S.E, M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah ***“Terwujudnya masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”***

Dalam pencapaian visi ini, dinas pangan berperan dalam pencapaian misi yang ke empat dari 5(lima) misi Kabupaten Pesisir Selatan yaitunya meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Pada tahun 2019 ada dua sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan
2. Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - c. Pembangunan Lumbung Pangan (DAK dan Pendamping)
 - d. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat
 - e. Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan, Pasokan, Harga Pangan dan HBKN
 - f. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah.
 - g. Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
 - h. Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)
 - i. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan
 - j. Penyusunan Database Ketahanan Pangan
 - k. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI
 - l. Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - m. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi]
 - n. Penunjang DAK Ketahanan Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan
 - b. Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan
 - c. Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen
 - d. Penyusunan Pola Pangan Harapan
 - e. Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan
 - f. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
 - g. Model Percontohan Keamanan Pangan
 - h. Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman

- i. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan
- j. Penyusunan Ranperda tentang Ketahanan Pangan

Sasaran yang telah ditetapkan tersebut terealisasi dengan baik karena ditunjang oleh program dan kegiatan yang terealisasi dengan tingkat capaian kinerja secara umum 100% konsumsi pangan sudah melebihi dari tingkat kecukupan konsumsi, tapi dari keberagamannya yang masih kurang, dimana konsumsi pangan untuk jenis pangan tertentu seperti buah dan sayur menurun. Berdasarkan akuntabilitas keuangan, anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan sampai dengan bulan Desember 2019 terealisasi sebesar 98,14 %.

Untuk kedepannya diharapkan alokasi anggaran dapat ditingkatkan bagi pembangunan ketahanan pangan karena pembangunan ketahanan pangan adalah prioritas pembangunan daerah yang menyangkut hajat hidup masyarakat, dimana jika timbul suatu kondisi yang tidak ideal baik itu kelebihan maupun kekurangan pangan akan dapat menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Susunan Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	3
1.3 Kepegawaian	5
1.4 Isu Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	11
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019....	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	14
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	15
3.3 Capaian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	15
3.4 Akuntabilitas keuangan	31
BAB IV. PENUTUP	33
LAMPIRAN	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.	Jumlah Pegawai Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ...	5
Tabel 1. 2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	5
Tabel 1. 3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	5
Tabel 2. 1.	Misi, Tujuan dan Sasaran	12
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja	13
Tabel 3.1.	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019	14
Tabel 3.2.	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019	15
Tabel 3.3.	Perkembangan Skor Pola Pangan Tahun 2016-2019	18
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.	19
Tabel 3.5.	Perkembangan Tingkat Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016-2019	19
Tabel 3.6.	Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	24
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.	25
Tabel 3.8.	Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2019	25
Tabel 3.9.	Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	36
Tabel 3.10.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program yang Menunjang Sasaran Strategis	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.	Struktur Organisasi	2
Gambar 3. 1.	Grafik Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016-2019	18
Gambar 3. 2.	Grafik Perkembangan Tingkat Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016-2021	20
Gambar 3. 3.	Grafik Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan (Energi dan Protein) Tahun 2017-2019	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan, bahan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyajian, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.

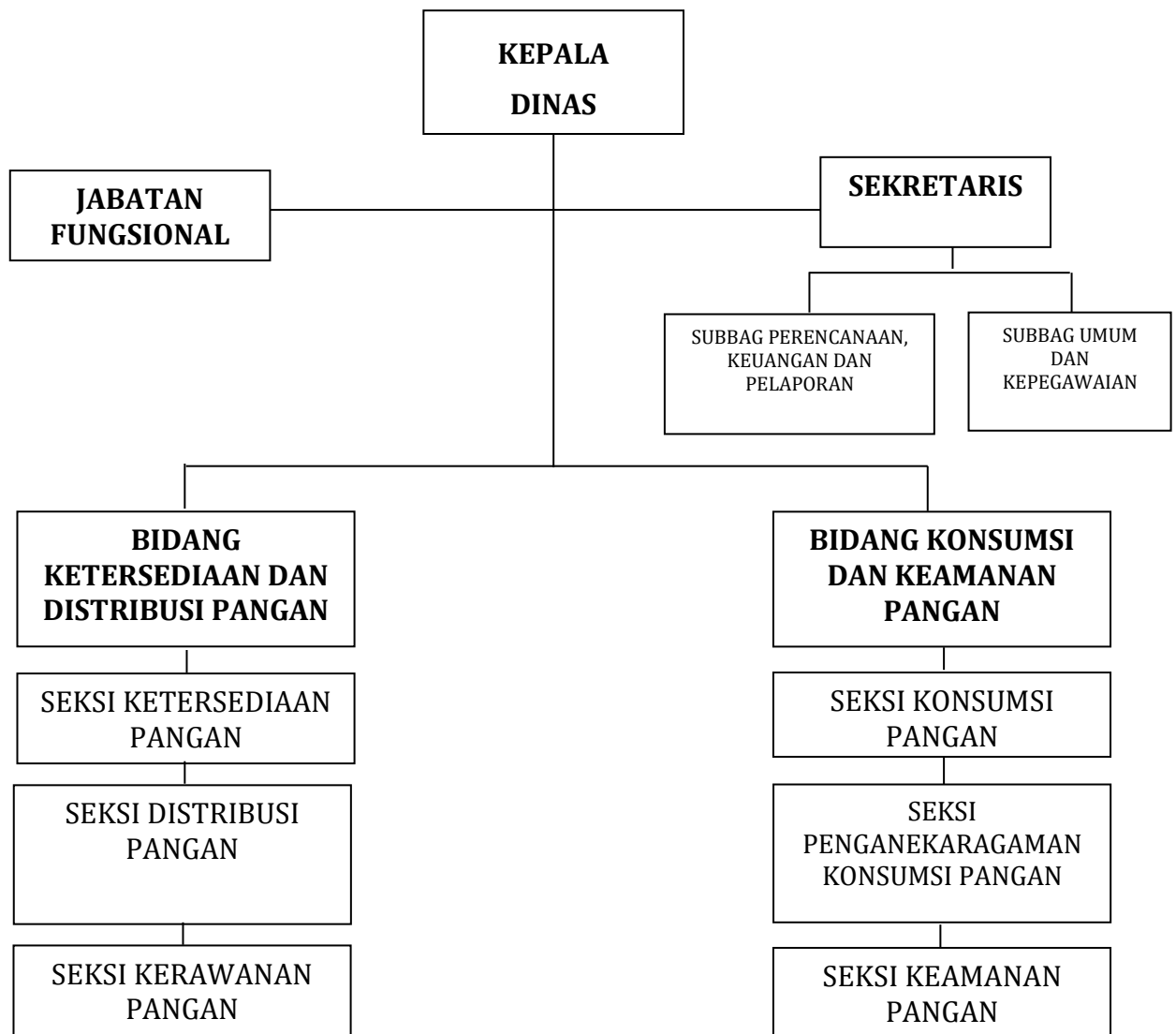
Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas daerah dalam RPJMD 2016-2021 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangan sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Ketahanan pangan disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak asasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarakat sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralisasi pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan inisiator, fasilitator serta agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya nasional dan daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah. Kedudukan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan perangkat daerah di bidang pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas pejabat Eselon II.a yaitu Alfis Basyir, S.E., M.Hum. yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai evaluasi kinerja satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2019 atas dasar kinerja

Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan evaluasi kinerja ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan satuan kerja Dinas Pangan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan serta sejauhmana pelaksanaan program/kegiatan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi



1.2. Susunan Organisasi Dinas Pangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pangan mempunyai kewenangan otonomi daerah dibidang pangan dengan struktur organisasi terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Dalam menjalankan kewenangan otonomi dibidang pangan, Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
5. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas

b. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pangan.

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan kegiatan di lingkungan Dinas Pangan.

c. Bidang yang terdiri dari 2 (tiga) bidang yaitu

1. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan

Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan konsep rumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, member petunjuk, mengatur dan menilai pelaksanaan kegiatan Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan serta menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup urusan dan tugas Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan berdasarkan peraturan dan ketentuan.

Bidang ketersediaan dan distribusi pangan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:

a) Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi ketersediaan pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi ketersediaan pangan

b) Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan evaluasi di seksi distribusi pangan

c) Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan pangan.

2. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi bidang yaitu :

a) Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di kegiatan konsumsi pangan.

b) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi dan keamanan pangan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan teknologi dan keamanan pangan berdasarkan ketentuan.

c) Seksi Keamanan Pangan

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan keamanan pangan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3. Kepegawaian

Berdasarkan kondisi per Januari 2019, jumlah aparatur Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 29 orang, Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 13 orang dan Golongan II sebanyak 2 orang.

Tabel 1.1. Jumlah pegawai Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No	Status PNS	Jumlah (Orang)	%
1.	PNS	21	72,41
2.	Tenaga Sukarela	8	27,59
Jumlah		29	100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa aparatur belum seluruhnya berstatus PNS, sehingga uraian selanjutnya tentang kondisi pegawai difokuskan hanya pada PNS sebanyak 21 orang.

a. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Dari 21 PNS Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan III yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	IV	6	28,57
2.	III	13	61,91
3.	II	2	9,52
Jumlah		21	100,00

b. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka status pendidikan sarjana lebih mendominasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 2 (S2)	6	28,57
2.	Starata 1 (S1)	10	46,62
3.	Diploma III (DIII)	-	0,00
4.	SLTA	5	23,81
Jumlah		21	100,00

1.4. Isu Strategis Yang Dihadapi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Isu strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Adapun yang menjadi isu strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya

Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi pelayanan Bidang Ketahanan Pangan dimana berperan dalam menjamin konsumsi pangan yang aman. Banyaknya ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya lainnya pada pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah. Untuk menjamin keamanan pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah perlu dilakukan kerjasama antar sektor untuk melakukan uji terhadap pemakaian residu, zat aditif dan berbahaya lainnya. Keamanan pangan merupakan jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya pada konsumen bila disiapkan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya. Betapapun terjadi peningkatan penyediaan pangan, semua akan menjadi sia-sia apabila tingkat kesehatan masyarakat justru menurun akibat mengkonsumsi pangan yang tidak bermutu dan tingkat keamanannya tidak terjamin. Oleh karenanya keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh manusia. Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan mulai dari on farm sampai pangan siap diedarkan. Untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan segar, perlu koordinasi dengan instansi terkait secara terpadu, serta advokasi kepada pemangku kepentingan. Praktek penanganan pangan harus diterapkan di setiap rantai pangan. Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan mulai dari proses budidaya dengan menerapkan praktek budidaya pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices (GAP)* agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi, cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik atau *Good Holding Practice (GHP)*. Begitu juga dalam pengolahan pangan, keamanan pangan dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. Demikian halnya pada rantai distribusi dan retail, keamanan pangan segar dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Distribution Practices (GDP)* dan *Good Retail Practices (GRP)*.

2. Tingginya fluktuasi harga pangan yang dibutuhkan masyarakat

Tingginya fluktuasi harga pangan yang terjadi di dalam negeri, mendorong Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan nasional yang bertujuan untuk menstabilkan harga serta mengurangi dampak negatif yang diterima oleh produsen sekaligus konsumen. Fluktuasi harga yang ditunjukkan oleh nilai Coeffisien Variation (CV). Nilai CV harga yang

tinggi menunjukkan bahwa harga jual bersifat fluktuatif dan kondisi ini akan berpengaruh terhadap inflasi.

3. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras

Kesadaran tentang pentingnya upaya diversifikasi pangan telah lama dilaksanakan di Indonesia, namun demikian hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Kebijakan diversifikasi pangan diawali dari Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dengan menggalakkan produksi telo, kacang dan jagung yang dikenal dengan tekad, sampai yang terakhir adanya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Walaupun telah berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan berbagai kalangan terkait, namun pada kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat masih tertumpu pada pangan utama beras. Hal itu diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber bahan pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan. Dikaitkan dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki sumber daya hayati yang sangat kaya. Ironisnya, tingkat konsumsi sebagian penduduk Indonesia masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan pangan dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga.

4. Masih banyak wilayah rawan pangan/penduduk miskin

Rawan pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk. Secara teknis dari sisi waktu kejadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi 2 bagian yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis”. Kerawanan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dll). Kerawanan Pangan Kronis adalah : suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan.

Salah satu penyebab utama kerawanan pangan adalah kemiskinan yang berkepanjangan. Pendekatan yang dilakukan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan / rawan pangan adalah pemberdayaan masyarakat melalui : (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik; serta (6) peningkatan ketahanan pangan.

5. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan pentingnya mengonsumsi menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

Dengan berpedoman kepada Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, maka periode RPJMD tersebut merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD yang diarahkan kepada “mengembangkan sektor industri dan jasa (agroindustri dan pariwisata)” sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Agrobisnis memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi, dan perbaikan perekonomian masyarakat pedesaan. Pengembangan Agrobisnis berbasis pangan lokal berbagai aspek perlu diperhatikan dalam upaya mengembangkan agroindustri berbasis pangan lokal. Ketersediaan bahan baku yang merupakan sumberdaya lokal merupakan faktor utama. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah teknologi pengolahan, sumberdaya manusia dan pasar. Dari sisi kebijakan pemerintah dapat dilakukan dalam kegiatan resmi di daerah selalu disajikan makanan lokal, ini merupakan salah satu cara promosi yang bermanfaat bagi produsen. Makanan tradisional perlu terus dipromosikan di hotel, restoran, kereta api, kapal laut maupun pesawat terbang. Festival masakan tradisional berbahan baku lokal perlu diadakan secara rutin di tiap daerah maupun tingkat nasional sebagai upaya promosi pangan lokal. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa manusia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan. Berkaitan dengan hal tersebut, penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Dalam rangka pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut :

- a. Pengembangan budidaya berbagai jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan keluarga seperti umbi-umbian, sayuran, buah, serta ternak dan ikan sebagai tambahan sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi keluarga
- b. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pengembangan pangan segar untuk memenuhi persyaratan minimal keamanan pangan dan mutu pangan.
- c. Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

6. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, pemerintah nagari dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat

Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. Cadangan Pangan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari : (1) cadangan pangan pemerintah; (2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan (3) cadangan pangan masyarakat. Sedangkan cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah desa.

Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintahan Nagari dilakukan melalui :

- a. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
- b. Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
- c. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari.

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan cadangan pangan masyarakat diarahkan pada :

- a. Cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar daerah (*Buffer Stock*);
- b. Cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan (*Buffer Stock*);
- c. Cadangan pangan untuk mengatasi goncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi defisit pangan tidak terduga (*Emergency Reserve*);

Cadangan pangan untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada kondisi darurat karena bencana, dan masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan (*Food Aid Reserve*). Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari : cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Tujuan penyediaan cadangan pangan adalah untuk menanggulangi kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan atau keadaan darurat.

7. Belum optimalnya kerjasama sinergi diantara OPD terkait dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan

Membangun ketahanan pangan dan gizi sangat kompleks, memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran dalam mewujudkan kemandirian pangan guna ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga sampai perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Dalam rangka optimalisasi dan sinergisitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain 1) memperkuat kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mampu melahirkan kebijakan nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan dan penanganan nagari-nagari rawan pangan, 2) mensinergikan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, 3) meningkatkan koordinasi dalam peningkatan penanganan keamanan pangan hasil tangkapan ikan, makanan jajanan anak sekolah dan pangan segar lainnya, 4) penguatan sistem informasi pangan dan gizi dalam rangka pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 521/48/KPTS/PANGAN/2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021. Visi, misi, agenda dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, dan tujuan serta sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. V i s i

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional, serta mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

VISI

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”.

Mandiri adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.

Unggul adalah masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.

Agamis adalah mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.

Sejahtera adalah perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan daya beli manusia.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, ditetapkan lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

M I S I	1.	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
	2.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah;
	3.	Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK;
	4.	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan;
	5.	Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

2.1.3. Agenda dan Prioritas Pembangunan

Berdasarkan visi kepala daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan
		2. Meningkatnya konsumsi pangan

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang telah ditetapkan berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Tabel. 2. 2.
PERJANJIAN KINERJA

KABUPATEN : PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	139
2.	Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan	Tingkat Konsumsi a. Energi (kkal/kap/hari) b. Protein (gram/kap/hari)	2.223 59
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pangan	Hasil Penilaian AKIP Dinas Pangan oleh Inspektoral	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah perwujudan kewajiban Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2019		
				Target	Realisasi	Capaian
Misi 4 : Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan mengedepankan pembangunan berkelanjutan						
Tujuan : Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan						
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama	kg/kapita/tahun	139	153,67	110,55
2.	Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan	Tingkat Konsumsi				
		a. Energi	kkal/kapita/hari	2.223	2.327	104,67
		b. Protein	gram/kapita/hari	59	61,86	104,85
	Rata-rata capaian					106,69

Dari tabel 3.2. dapat dilihat bahwa dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan terlihat bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sudah sangat baik.

Dari tabel 3.2. dapat dilihat, capaian rata-rata 2 (dua) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebesar 106,69 Capaian indikator kinerja terendah yaitu tingkat konsumsi protein sebesar 104,67%.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.1, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian misi yang ke 4 yaitu:

Misi 4 Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Dengan Tetap Mengedepankan pembangunan berkelanjutan”.

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu (1) Peningkatan produksi; (2) peningkatan nilai tambah; dan (3) pembangunan berkelanjutan. Peningkatan produksi yang dimaksud dalam misi ini adalah peningkatan produksi pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, serta peternakan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dapat dicapai melalui pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien dan skala ekonomi, diantaranya dengan cara; (1) Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksi yang digunakan; (2) Ekstensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis dan keanekaragaman produksi; dan (3) Diversifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) Rasionalisasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mewujudkan misi tersebut, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Untuk mewujudkan misi 4, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Selanjutnya uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian sasaran strategis secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Tujuan : mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan

Indikator kinerja tujuan adalah skor pola pangan harapan dengan formulasi:

Skor pola pangan harapan = $\text{persentase energi dari kelompok pangan (sembilan kelompok pangan)} \times \text{bobot}$

Langkah-langkah menghitung Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebagai berikut :

1. Mengelompokkan jenis pangan ke dalam delapan kelompok pangan.
2. Menghitung jumlah energi masing-masing kelompok pangan dengan DKBM (Daftar Komposisi Bahan Makanan)
3. Menghitung persentase masing-masing kelompok pangan terhadap total energi per hari.
4. Skor PPH dihitung dengan mengalikan persen energi dari kelompok pangan dengan bobot.

Sembilan kelompok pangan antara lain : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain.

Pada tahun 2016, skor pola pangan harapan adalah 72,9 dengan target 78, tahun 2017 meningkat menjadi 76,5 dengan target 79 tahun 2018 meningkat menjadi 80,5 dengan target 80, sedangkan tahun 2019 mencapai 84,0 dengan target sebesar 81. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Capaian ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan kelompok padi-padian merupakan penyumbang tertinggi untuk konsumsi energi. Khusus kelompok padi-padian, masyarakat sudah mulai mengurangi konsumsi padi-padian dan menggantinya dengan umbi-umbian. Namun dari analisa konsumsi energi dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan skor pada kelompok padi-padian sebesar 1,5. Pada beberapa kelompok pangan terjadi peningkatan skor pola pangan harapan dari tahun 2019 yaitu kelompok pangan hewani sebesar 1,2 dari skor 15,5 menjadi 16,7. Pada kelompok kacang-kacangan, dimana pada tahun 2019 sebesar 3,7 meningkat menjadi 3,9 dan masih jauh dibawah skor maksimum PPH yaitu 10,0. Pada kelompok sayur dan buah tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,8 dari tahun 2018 sebesar 25,9 menjadi 28,7 pada tahun 2019. Pada tahun 2019 skor pola pangan harapan 84,0 terjadi peningkatan dibanding tahun 2018 skor pola pangan harapan 80,5 atau sebesar 3,5. Hal ini dimungkinkan adanya perbedaan jumlah komoditi pangan yang dikonsumsi rumah tangga yang disurvei pada tahun 2017 dan tahun 2018.

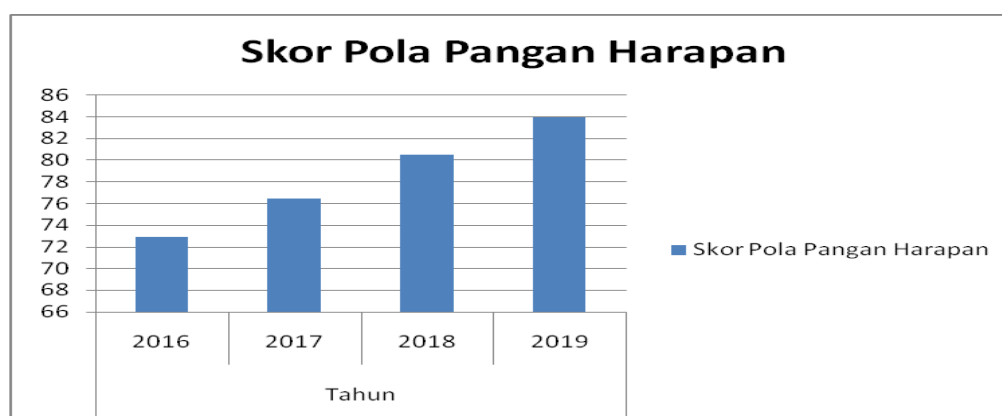
Pada beberapa kelompok pangan seperti padi-padian, minyak dan lemak dan buah/biji berminyak masih perlu untuk penurunan konsumsi untuk kelompok tersebut, hal ini terlihat dari skor PPH dengan Angka Kecukupan Energi masih diatas skor maksimal PPH. Sementara pada pangan hewani masih rendah yaitu tahun 2018 dengan skor 16,7 meningkat pada tahun 2019 menjadi 17,5. Namun belum sesuai dengan target yaitu 24. Kelompok pangan kacang-kacangan masih perlu peningkatan dari 3,9 pada tahun 2019, konsumsi idealnya pada skor 10. Kelompok pangan umbi-umbian masih dibawah target tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan, sementara konsumsi ideal adalah skor 2,5. Kelompok pangan sayur dan buah juga masih dibawah target dan terjadi peningkatan konsumsi pada tahun 2019 dari 25,9 menjadi 28,7. Sementara konsumsi ideal pada skor 30,0.

Tingginya konsumsi kelompok padi-padian khusus beras, kemungkinan disebabkan oleh pola makan masyarakat yang masih tergantung pada beras sebagai sumber energi dan didukung oleh produksi dan ketersediaan beras yang cukup tinggi, sedangkan konsumsi 8 (delapan) kelompok 8 (delapan) kelompok pangan lainnya baik kuantitas, kualitas maupun tingkat keragamannya relatif masih rendah jika dibandingkan dengan standar konsumsi pangan nasional, hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal seperti bahan pangan yang relatif masih dan rendahnya daya beli masyarakat. Untuk lebih jelasnya perkembangan skor pola pangan harapan dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.3. Perkembangan skor pola pangan harapan tahun 2016-2019

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Skor Pola Pangan Harapan	72,9	76,5	80,5	84,0

Gambar 3.1. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016-2019



Perkembangan konsumsi energi dan protein tahun 2016-2019 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 3,6 dimana tahun 2016 dengan skor pph 72,9 dan tahun 2017 dengan skor pph 76,5, tahun 2018 dengan skor 80,5, sedangkan tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 3,5 menjadi 84,0. Hal ini sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 82. Hal ini guna mendukung sasaran pembangunan nasional di bidang pangan dan gizi adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi pada tingkat rumah tangga yang tercermin pada ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, hasil yang akan dicapai ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Ketersediaan Pangan

1. Tingkat ketersediaan pangan utama

Formulasi tingkat ketersediaan pangan utama :

$$\text{Tingkat ketersediaan pangan utama} = \frac{\text{Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$$

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1. terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja.

Adapun capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Capaian Indikator kinerja sasaran strategis 1.1.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat ketersediaan pangan utama	kg/kapita/tahun	137	143,02	104,39	139	153,67	110,55
Rata-rata capaian					104,02			110,55

Dari tabel diatas terlihat bahwa ketersediaan pangan utama sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dan sesuai dengan persyaratan gizi, merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Untuk menjawab masalah ini diperlukan informasi mengenai situasi pangan di suatu daerah pada periode tertentu. Hal ini dapat terlihat dari gambaran produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk per kapita.

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran situasi pangan dapat disajikan dalam suatu neraca atau tabel yang dikenal dengan nama Neraca Bahan Makanan". Dalam rangka penyusunan program pembangunan ketahanan tersebut, maka diperlukan analisis situasi pangan yang dituangkan dalam Neraca Bahan Makanan.

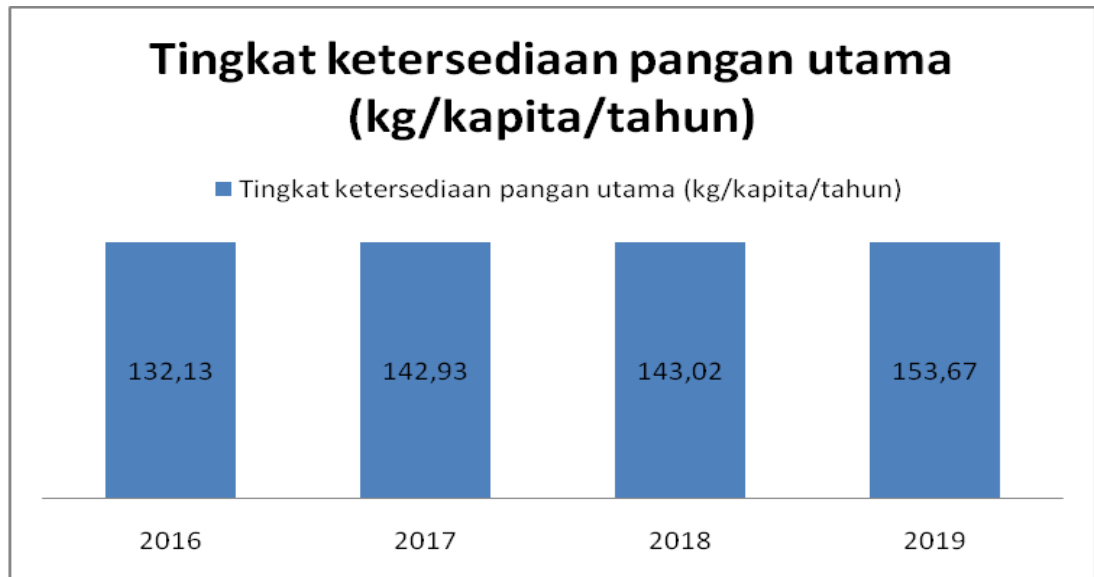
Berikut perkembangan tingkat ketersediaan pangan utama di Kabupaten Pesisir Selatan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.5. Perkembangan tingkat ketersediaan pangan utama Tahun 2016-2019

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Tingkat ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	132,13	142,93	143,02	153,67

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan ketersediaan pangan utama dari tahun 2016-2019 seperti grafik dibawah ini:

Grambar 3. 2 Tingkat ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)



Data Ketersediaan pangan utama diperoleh melalui analisa neraca bahan makanan. Situasi ketersediaan pangan untuk menggunakan Tabel Neraca Bahan Makanan (NBM). Melalui NBM dapat diketahui kondisi ketersediaan pangan dalam periode tertentu (defisit atau surplus), baik ketersediaan dalam jumlah (volume) yang dinyatakan dalam satuan kilogram/kapita pertahun. Dalam penyusunan NBM Kabupaten Pesisir Selatan secara umum mengacu pada metode penyusunan NBM yang disusun oleh Tim NBM Pusat dan khusus untuk angka rendemen, kebutuhan bibit, pakan ternak, tercecer memakai angka ketetapan nasional dan angka yang disepakati di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pencapaian target sasaran strategis 1.1. didukung oleh :

1. Data produksi dari penyuluh pertanian di lapangan yang digunakan untuk perhitungan ketersediaan pangan utama.
2. Jumlah penduduk juga mempengaruhi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi.

Faktor keberhasilan :

1. Tersedianya lahan luas yang potensial yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan.
2. Iklim dan cuaca secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil sumber daya pangan.
3. Tingginya jumlah produksi yang memungkinkan meningkatnya ketersediaan pangan.
4. Adanya penyuluh yang membantu dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi
5. Teknologi yang diterapkan dalam membantu meningkatkan produksi .

6. Infrastruktur yang memudahkan pendistribusian hasil pangan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain.

Hambatan dan kendala yang dihadapi :

1. Penyerapan pangan yang tidak maksimal yang belum mampu mencapai ketahanan pangan meskipun telah mencapai surplus pangan.
2. Akses pangan masyarakat di beberapa daerah masih tergolong rendah.
3. Distribusi pangan yang belum merata dan belum terjangkau oleh konsumen.
4. Pengelolaan ketersediaan stock bahan pangan belum optimal.
5. Infrastruktur dan prasarana distribusi yang belum memadai.

Upaya yang dilakukan :

1. Mengaktifkan kembali fungsi lumbung pangan masyarakat untuk menjamin ketersediaan pangan di daerah rawan pangan dan masa paceklik serta sebagai sumber usaha masyarakat yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan ketersediaan pangan tingkat nagari.
2. Adanya koordinasi dengan penyuluh yang berperan untuk memberikan penyuluhan dan kepada petani, bagaimana cara mengolah lahan dan meningkatkan produksi serta produktifitas dengan menerapkan teknologi.
3. Mengaktifkan kembali fungsi lembaga masyarakat yang membantu dalam menyediakan pangan dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 1.1 didukung oleh program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dengan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Penanganan daerah rawan pangan.



Penanganan Daerah rawan Pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Capaian kinerja indikator ini diperoleh dari jumlah masyarakat yang dibantu Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang rentan pangan, dalam hal ini diakibatkan oleh bencana alam, bantuan yang diberikan berupa bahan pangan sebanyak 760 kg beras, 76 liter minyak goreng, 114 butir telur ayam ras dan 38 kardus mie instan.

Bantuan ini diberikan kepada 38 kepala keluarga. Lokasi pemberian bantuan adalah nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas.

2. Penguatan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.



Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada 23 Nagari terdapat lumbung pangan masyarakat yang bermanfaat untuk menyimpan beras cadangan masyarakat sebagai cadangan pada saat terjadinya bencana alam dan

masa paceklik. Pada tahun 2019 dibangun kembali bangunan lumbung pangan yang berlokasi di nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, sehingga total lumbung pangan masyarakat berjumlah 24 lumbung pangan.

3. Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN

Stabilitas harga merupakan tindakan mempertahankan suatu harga barang atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai upaya dalam menstabilkan harga barang dan jasa selama periode tertentu. Salah satu upaya menjaga kestabilan harga adalah dengan penyediaan pangan nasional. Dengan adanya cadangan



pangan nasional yang mencukupi, diharapkan lonjakan harga di waktu-waktu tertentu dapat dicegah. Tetapi saat ini pemerintah baru memiliki cadangan pangan nasional sebatas komoditas beras saja. Langkah atau upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga ini selain dengan cadangan pangan pemerintah juga dengan melakukan operasi pasar dan penyelenggaraan pasar murah untuk masyarakat melalui koordinasi dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.



4. Penguatan cadangan pangan pemerintah kabupaten.

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebaiknya dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berakibat terhadinya rawan pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dinyatakan bahwa untuk

mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional tersebut terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat.

Pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan melalui pembelian pangan pokok tertentu produksi dalam negeri berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Perum Bulog. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu. Penyaluran pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi (1) kekurangan pangan, (2) gejolak harga pangan, (3) bencana alam, (4) bencana sosial, dan atau (5) keadaan darurat. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, cadangan pangan pemerintah pada tahun 2019 berjumlah 45,25 ton. Beras yang disalurkan pada tahun 2019 berjumlah 3 ton yang diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana alam.

5. Pengembangan usaha pangan masyarakat / TTI.

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat /Toko Tani Indonesia merupakan wadah bagi Gapoktan/supplier/produsen pangan lainnya untuk memasarkan komoditas pangan hasil produksi pertanian khususnya beras. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen karena dapat membeli beras dengan harga dibawah harga pasar.



6. Analisis ketersediaan pangan berdasarkan analisa Neraca Bahan Makanan (NBM).

Situasi ketersediaan pangan utama untuk dikonsumsi masyarakat dapat diketahui dengan menggunakan tabel yang memuat informasi tentang pengadaan/penyediaan pangan dan penggunaan pangan, hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Melalui NBM dapat diketahui kondisi ketersediaan pangan dalam periode waktu tertentu (defisit atau surplus), baik ketersediaan dalam jumlah (volume) yang dinyatakan dalam satuan kilogram perkapita pertahun atau gram perkapita perhari maupun ketersediaan gizi perkapita yang dinyatakan dalam satuan kkal/kapita/hari (untuk ketersediaan energi) atau gram/kapita/hari (untuk ketersediaan protein).

Dalam penyusunan NBM, data yang digunakan bersumber dari berbagai instansi terkait. Daya yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari instansi antara lain BPS, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Bulog di Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

Ketersediaan pangan yaitu terjaminnya pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya

Adapun jumlah anggaran yang digunakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 1.1 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(pertanian/perkebunan)

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan	963.973.115	912.297.983	98,05

Sasaran 2.1
Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2.1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja.

1. Tingkat Konsumsi pangan

a. Konsumsi energi

b. Konsumsi protein

Formulasi tingkat konsumsi pangan :

Tingkat konsumsi Energi	: <u>Jumlah energi rumah tangga per hari</u> Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)
Tingkat konsumsi protein	: <u>Jumlah protein rumah tangga per hari</u> Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)

Capaian kinerja indikator sasaran strategis 2.1 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Konsumsi Pangan							
	a. Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2.247	2.326	103,52	2.223	2.327	104,67
	b. Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari	60	61,78	102,97	59	61,86	104,85
Rata-rata Capaian					103,63			104,76

Dari tabel 2.1 dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 2.1 sebesar 103,25 %. Pencapaian sasaran strategis 2.1 termasuk sangat baik dengan kategori sangat berhasil.

Untuk melihat perkembangan tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2019.

Tabel 3.8. Perkembangan tingkat konsumsi pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2019

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Tingkat konsumsi pangan				
	a. Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	2.319,5	2.377,4	2.326	2.327
	b. Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	59,2	63,0	61,78	61,86

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa perkembangan capaian konsumsi energi dan protein dari 9 kelompok pangan terjadi peningkatan selama kurun waktu tahun (2016-2018) dapat dilihat hasil sebagai berikut :

1. Konsumsi energi secara keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Konsumsi energi pada tahun 2016 sebesar 2.319,5 kkal/kapita/hari dan

terjadi peningkatan pada tahun 2017 menjadi 2.377,4 kkal/kapita/hari, sedangkan tahun 2018 terjadi penurunan konsumsi menjadi 2.326 kkal/kapita/hari dan meningkat lagi pada tahun 2019 sebesar 2.327 kkal/kapita/hari. Konsumsi energi lebih tinggi dari angka kecukupan energi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012 yaitu 2.150 kkal/kapita/hari.

2. Konsumsi protein secara keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu tahun tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016 sebesar 59,2 gram/kapita/hari, tahun 2017

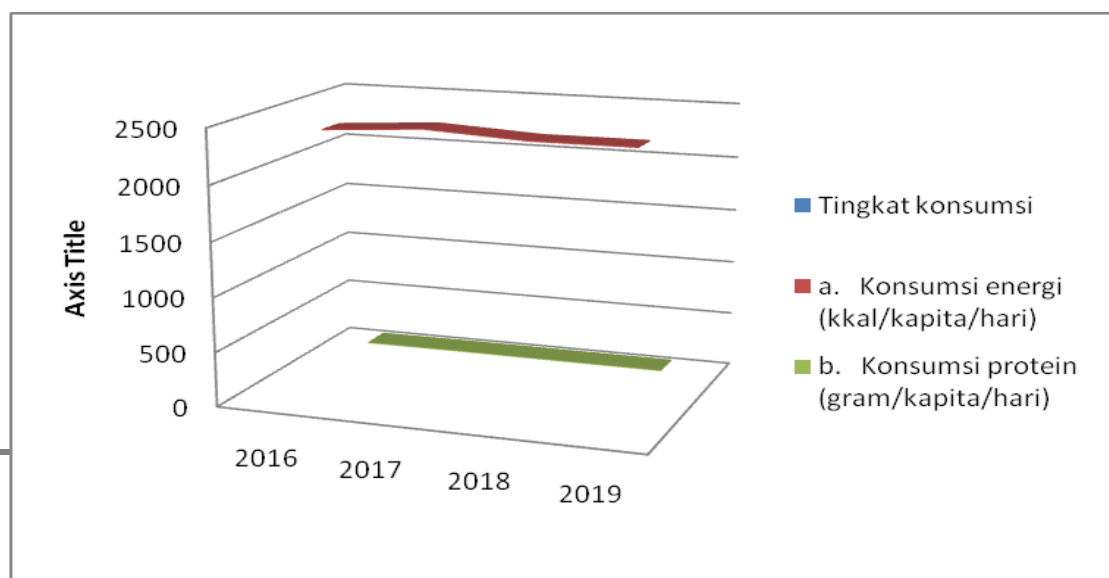


kembali terjadi peningkatan menjadi 63,0 gram/kapita/hari, sedangkan tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 61,78 dan meningkat kembali pada tahun 2019 sebesar 61,86. Konsumsi energi ini lebih tinggi dari angka kecukupan protein Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012 yaitu 57 gram/kapita/hari.

Dari data konsumsi energi dan protein disebabkan oleh tingginya konsumsi pada kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, buah dan sayur harus ditingkatkan. Tingginya tingkat konsumsi beberapa kelompok pangan seperti padi-padian menunjukkan masih kurangnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Hal ini menyebabkan konsumsi energi yang tinggi belum berimbang walaupun melebihi target yang ditetapkan. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar menggantinya dengan umbi-umbian dan meningkatkan konsumsi kacang-kacangan, pangan hewani, sayur dan buah untuk mencapai angka standar konsumsi energi dan protein.

Untuk melihat perkembangan tingkat konsumsi energi dan protein dapat dilihat seperti grafik dibawah ini :

Gambar 3.3. Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan (Energi dan Protein) Tahun 2016-2019



Faktor keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2.1

1. Produksi pangan yang tersedianya dalam jumlah yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat
2. Penganekaragaman pangan (diversifikasi pangan) melalui sosialisasi maupun penyuluhan bagi masyarakat untuk tidak bergantung pada satu sumber pangan memungkinkan masyarakat dapat menetapkan pangan pilihan sendiri.
3. Pemberdayaan kaum perempuan melalui peningkatan pendidikan dan keterampilannya dalam pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
4. Gerakan konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi pangan secara beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk dikonsumsi.

Hambatan yang dihadapi :

1. Jumlah penduduk yang cukup besar menyebabkan permintaan pangan lebih tinggi daripada ketersediaan.
2. Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti gizi dan kesehatan.
4. Promosi dan penyebaran informasi masih terbatas.

Strategi/Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan :

1. Meningkatkan produksi pangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar yang semakin meningkat.
2. Penyediaan suplai pangan dengan mengembangkan sumberdaya lokal yang dilakukan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan, pengembangan pangan lokal dan pengembangan makanan tradisional.
3. Meningkatkan promosi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
4. Pembinaan kepada pedagang kecil guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 2.1 didukung oleh program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ditunjang melalui kegiatan Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan pangan keluarga. Kelompok.



2. Pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat



Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari Pesisir Selatan maupun luar kabupaten belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah/tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi lainnya yang beredar di masyarakat perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar tersebut.

Kebijakan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahan cemaran yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Diharapkan kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat Pesisir Selatan dapat meningkat, oleh karena itu dilaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.



Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian pengetahuan kepada pihak sekolah dan pedagang tentang pentingnya menjaga keamanan pangan yang akan dikonsumsi untuk kesehatan masyarakat khususnya anak sekolah. Selain itu dilakukan juga pengawasan dan pengambilan sampel terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor terkait, serta dengan melaksanakan rapat koordinasi tim terpadu pengawasan keamanan pangan segar. Sampel pangan segar yang ada di tengah masyarakat diuji di laboratorium sehingga diketahui cemaran yang

bisa mempengaruhi pangan tersebut. Dengan demikian terjadi peningkatan ketersediaan pangan segar yang aman dan bermutu yang beredar di tengah masyarakat. Selain pangan segar, juga dilakukan uji sampel terhadap ikan dan jajanan anak sekolah.

3. Penyusunan pola pangan harapan.

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi, jumlah dan jenis pangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi.

Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui suatu sistem Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah suatu komposisi pangan yang seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola Pangan Harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi, cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kualitas dan kemampuan daya beli.

Tabel 3.9 Perbandingan Skor PPH Kabupaten Pesisir Selatan dengan Skor Maksimal PPH

No	Kelompok pangan	Skor Maks PPH	Skor PPH 2019
1	Padi-padian	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	0,7
3	Pangan Hewani	24,0	17,5
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	10,0	3,6
7	Gula	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	30,0	28,7
9	Lain-lain	0,0	0,0
	Jumlah	100,0	84,0

4. Perumusan kebijakan ketahanan pangan melalui dewan ketahanan pangan.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan ditujukan untuk menumbuhkembangkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten yang diketuai langsung oleh Kepala Daerah yakni Bupati Pesisir Selatan. Sehingga keberadaan DKP di daerah menjadi proaktif dalam menyikapi kondisi dan persoalan pangan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Diselenggarakan Rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, ditujukan untuk mempermudah koordinasi antara SKPD/lintas sektoral dalam berkoordinasi bagi anggota DKP untuk mencari solusi persoalan yang tengah terjadi di masyarakat.

Rapat koordinasi DKP Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 yang bertempat di Hotel Triza Painan menghadirkan peserta dengan jumlah sebanyak 75 orang dihadiri oleh Bapak Sekda, Ir Erizon, M.T serta anggota DKP tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dengan tema Penanggulangan Kerawanan Pangan dengan Sinkronisasi Program di Nagari Mandiri Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.



Adapun Rumusan hasil rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Setiap nagari harus memiliki lumbung pangan.
- b. Ketahanan pangan dimulai dari tingkat rumah tangga dengan melaksanakan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
- c. Penanganan kerawanan pangan dan kerentanan pangan harus ditangani secara terintegrasi oleh seluruh sektor mulai dari pusat, propinsi dan kabupaten
- d. Perlunya sinergitas seluruh sektor terkait dalam menyelesaikan persoalan kerawanan pangan terutama pada Nagari Mandiri Pangan melalui program dan kegiatan ketahanan pangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
- e. Nagari mandiri pangan sudah merupakan prioritas dalam pembangunan daerah dengan mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana serta peningkatan sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan Nagari Mandiri Pangan.
- f. Adanya gerakan penghijauan disepanjang aliran sungai untuk menjaga cadangan air bersih melalui penanaman buah-buahan.
- g. Untuk memperpendek rantai distribusi pangan dampai ke masyarakat perlu adanya pembangunan pasar nagari terutama di nagari mandiri pangan
- h. Membangun irigasi pada lahan pertanian akan menjaga stabilitas kebutuhan air pada lahan pertanian
- i. Menindaklanjuti Perda Nomor 1 Tahunn 2019 tentang Ketahanan Pangan dimana pangan sebagai urusan wajib, maka sudah waktunya pemerintah berpihak kepada ketahanan pangan melalui peningkatan alokasi anggaran ketahanan pangan yang tersebar di perangkat daerah terkait.

- j. Guna meningkatkan kesejahteraan petani sebagai penghasil gabah maka diharapkan petani menjual beras bukan gabah sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

5. Teknologi pengolahan pangan lokal.

Pangan lokal adalah makanan yang berasal dari produk setempat dan diproses dengan sumber daya dan kearifan lokal. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Pangan lokal merupakan salah satu contoh pengetahuan tradisional yang dapat memberikan kebanggaan suatu bangsa, kelompok etnik, atau masyarakat di wilayah tertentu karena pengetahuan tersebut memberi identitas daerah.



Potensi makanan tradisional (pangan lokal) Kabupaten Pesisir Selatan yang saat ini dikembangkan adalah susu jagung yang diproduksi oleh KWT The Ampale Star. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk melestarikan keanakeragaman sumber pangan lokal, dan meningkatkan citra makanan non beras setara dengan makanan beras/terigu. Makanan lokal dirancang dapat untuk mendorong pembangunan ekonomi, khususnya melalui pariwisata, sehingga perlu dilakukan penelitian dan pengembangan lanjut terhadap pangan lokal khususnya non beras/terigu.

Adapun program yang menunjang sasaran strategis 2.1. adalah program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan anggaran dan realisasi seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya konsumsi pangan	578.293.300,-	568.367.498,-	98,28

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, tercantum pada tabel 3.9.

**Tabel 3.10. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2019		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	930.418.115,-	912.297.983,-	97,71
2.	Meningkatnya penganeekaragaman Konsumsi Pangan	578.293.300,-	568.367.497,-	98,28
Total		1.508.711.415,-	1.480.665.480,-	98,14

Dari tabel 3.9. diatas dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 untuk menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebesar Rp 1.508.711.415,- terealisasi sebesar 1.480.665.480,- atau 98,14%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 28.045.935,- atau secara absolut sebesar 1,86%
- b. Sisa anggaran sebesar 28.045.935,- disebabkan adanya efisiensi anggaran dengan mengurangi kegiatan yang tidak serta merta menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, yaitu :

1. Capaian sasaran

Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 106,69 dengan nilai tertinggi adalah 110,67% yaitu : tingkat ketersediaan pangan.

2. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah sampai 31 Desember Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp 1.480.665.480,- atau 98,24% dari target alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar 1.508.711.415,-. Dari 2 (dua) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan sebesar 98,28% dan terendah adalah meningkatkan ketersediaan pangan sebesar 97,71%.

3. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

- a. Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena pencapaian target kinerja tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.
- b. Perlu adanya sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara rutin untuk bahan perbaikan di masa yang akan datang.
- d. Melakukan sinkronisasi kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah agar kegiatan bersifat terpadu dan terfokus kepada satu kawasan.